



LKJIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN WONOSALAM
TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Wonosalam sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Wonosalam, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Kabupaten.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Wonosalam diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.
3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*service excelent*) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Goverment*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai “*pelayanan masyarakat*”.

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Wonosalam juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Value For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Wonosalam merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Wonosalam menjadikan kebutuhan Kecamatan Wonosalam belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Wonosalam masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

C. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Wonosalam Tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 59/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 59/D);

14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

D. Sistematika Laporan

Penulisan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LkjIP) Tahun 2021 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja pada tahun 2018 yang meliputi penyajian: Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Data Pegawai, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Matriks Renstra
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Perjanjian Kinerja
- D. Rencana Aksi
- E. Monitoring Rencana Aksi
- F. Lampiran lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 dijabarkan sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Wonosalam dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
- Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
- Penyelenggaraan pelayanan umum;
- Pembinaan dan pengoordinasian wilayah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
- b. Sub bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

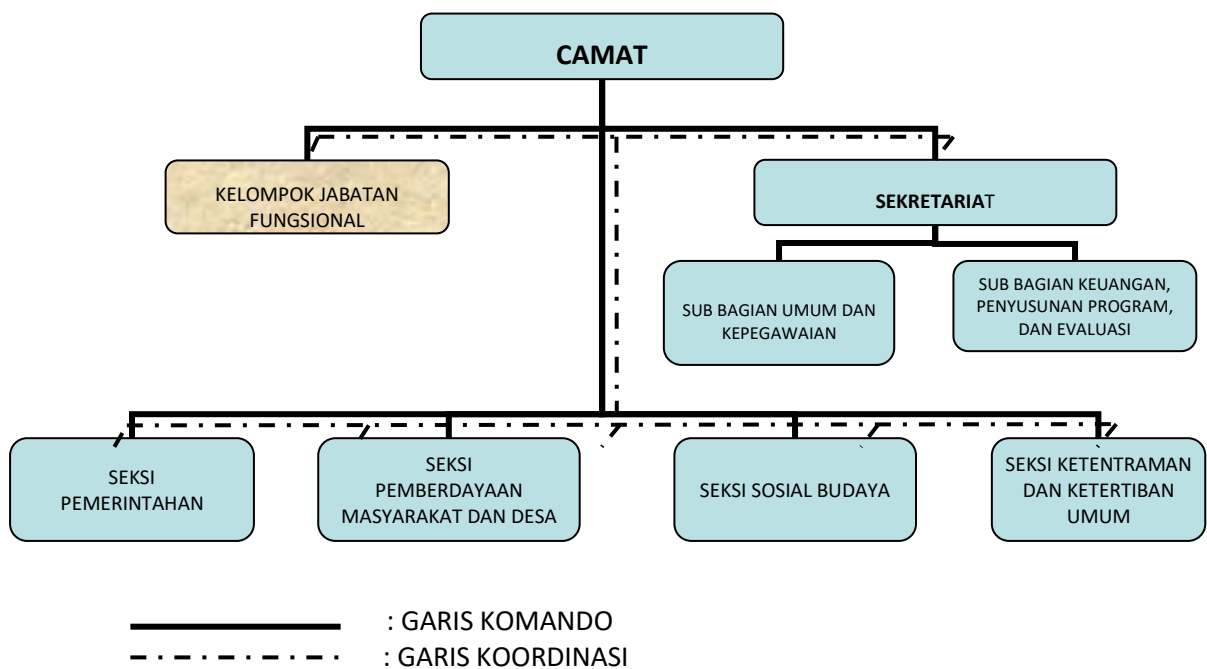
B. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Wonosalam tersaji sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Wonosalam



C. Data Pegawai

Rincian personil pegawai Kantor Kecamatan Wonosalam, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang per bulan Desember 2021 adalah sebagaimana tersaji dalam beberapa tabel berikut:

Tabel 2.1
Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	HARIS AMINUDDIN, S.STP.	197904011998101002	Camat Wonosalam
2	Drs. MOH. AINUL YAQIN, MM	196811211994031008	Sekretaris Camat
3	SUDARNO, S.IP	196806281992031005	Kasi Tata Pemerintahan
4	NURUL FUADI, S.AP	199005202015051001	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5	WINOTO, S.E	196506151988031026	Kasi Sosial Budaya
6	MOH. SHAFUAN ISDIANTO, S.Sos	198807092015051001	Kasi Trantibum
7	CHRISTIAN GLEDI WAHYUDI, S.E	19810803200641019	Kasubbag Umum, Kepegawaian, dan Aset
8	BAGUS AGUNG KURNIAWAN, S.AB	198805142015051001	Kasubbag Keuangan, Sungram & evaluasi

Tabel 2.2
Staf/Pelaksana

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	SUDJIADI, SE.	197304222005011011	Staf
2	KARLIYAN, SE.	196605252007011014	Staf
3	ROHMAT	196504202000101001	Staf
4	SANTOSO	197212242010011001	Staf
5	SUGENG HARIYANTO	196612012007011016	Staf
6	PUJI SLAMET	196505152010011001	Staf

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Wonosalam atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Wonosalam Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Wonosalam Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Wonosalam untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN WONOSALAM TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	BB (72,50)
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	IKM Kecamatan Wonosalam	86,66
		IPP Kecamatan Wonosalam	3,4
		Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	83,50	4.250.000
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	9.796.000
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	
3.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	4.800.000
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	25.044.000
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	18 Lembaga	
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	1.200.000
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
6.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.157.053.894
Jumlah					2.202.143.894,00

E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Wonosalam dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN/PENJELASAN	TARGET	SUMBER DATA																											
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	BB (72,5)	Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Wonosalam																											
		Definisi Operasional : Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) adalah Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)																														
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Wonosalam	IKM Kecamatan Wonosalam tahun n	85,66	Hasil Survey IKM Kec. Wonosalam																											
		Definisi Operasional : a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. b. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. c. 9 (Sembilan) unsur layanan : 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu	Target IKM 85,66 didasarkan nilai rata - rata dari hasil survey kepuasan masyarakat pada 9 unsur layanan dengan penjelasan sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Unsur Layanan</th><th>2022</th></tr><tr><td>1</td><td>Persyaratan</td><td>88</td></tr><tr><td>2</td><td>Prosedur</td><td>87</td></tr><tr><td>3</td><td>Waktu</td><td>87</td></tr><tr><td>4</td><td>Biaya</td><td>94</td></tr><tr><td>5</td><td>Produk</td><td>89</td></tr><tr><td>6</td><td>Kompetensi Pegawai</td><td>87</td></tr><tr><td>7</td><td>Perilaku Petugas</td><td>85</td></tr><tr><td>8</td><td>Sarana</td><td>84,66</td></tr></table>	No	Unsur Layanan	2022	1	Persyaratan	88	2	Prosedur	87	3	Waktu	87	4	Biaya	94	5	Produk	89	6	Kompetensi Pegawai	87	7	Perilaku Petugas	85	8	Sarana	84,66		
No	Unsur Layanan	2022																														
1	Persyaratan	88																														
2	Prosedur	87																														
3	Waktu	87																														
4	Biaya	94																														
5	Produk	89																														
6	Kompetensi Pegawai	87																														
7	Perilaku Petugas	85																														
8	Sarana	84,66																														

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN/PENJELASAN	TARGET	SUMBER DATA																								
		4. Biaya 5. Produk 6. Kompetensi Pegawai 7. Perilaku Petugas 8. Sarana Prasarana 9. Pengaduan	Prasarana 9 Pengaduan 89 Target IKM 202285,66																										
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Wonosalam	IPP Kecamatan Wonosalam tahun n	3,4	Hasil Survey IPPKec. Wonosalam																								
		Definisi Operasional : Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	Target IPP Kecamatan Wonosalam ditetapkan 3,4 dengan penilaian dari 6 Aspek layanan sebagai berikut : <table><thead><tr><th>No</th><th>Aspek Layanan</th><th>2022</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Kebijakan Pelayanan</td><td>3,9</td></tr><tr><td>2</td><td>Profesionalisme SDM</td><td>3,8</td></tr><tr><td>3</td><td>Sarana Prasarana</td><td>3,3</td></tr><tr><td>4</td><td>Sistem Informasi</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>Konslutasi dan Pengaduan</td><td>3,9</td></tr><tr><td>6</td><td>Inovasi</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Target IPP 2022</td><td>3,4</td></tr></tbody></table>	No	Aspek Layanan	2022	1	Kebijakan Pelayanan	3,9	2	Profesionalisme SDM	3,8	3	Sarana Prasarana	3,3	4	Sistem Informasi	3	5	Konslutasi dan Pengaduan	3,9	6	Inovasi	2	Target IPP 2022		3,4		
No	Aspek Layanan	2022																											
1	Kebijakan Pelayanan	3,9																											
2	Profesionalisme SDM	3,8																											
3	Sarana Prasarana	3,3																											
4	Sistem Informasi	3																											
5	Konslutasi dan Pengaduan	3,9																											
6	Inovasi	2																											
Target IPP 2022		3,4																											
		Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang tindaklanjuti PD/ instansi terkait ----- x 100 % Jumlah laporan pelanggaran perda dan trantibum	100 %	Laporan Pelanggaran Perda dan Trantibum																								

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN/PENJELASAN	TARGET	SUMBER DATA
		Definisi Operasional : a. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa	100 %	Laporan Evaluasi LRA Desa
		Definisi Operasional : a. APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa b. Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. c. Laporan pertanggungjawaban APB Desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.			

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN/PENJELASAN	TARGET	SUMBER DATA
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah laporan Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa	100 %	Laporan Evaluasi Raperdes APB Desa
		Definisi Operasional : - Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan - Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi - Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat (pasal 37 Permendagri no. 20 tahun 2018) - Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.			

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Wonosalam telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd -----x100 jumlah pegawai
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n

	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100 Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Wonosalam yang difasilitasi	14 bulan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Wonosalam yang di fasilitasi tahun n
	2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD tahun n
	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Kali	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD tahun n
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan

	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	4 jenis	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 jenis	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	-	Jumlah pemenuhan barang cetak tahun n
			2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan	10000 lembar	Jumlah pemenuhan barang penggandaan tahun n
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	Jumlah pemenuhan bahan bacaan tahun n
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 dok	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	1 unit	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor tahun n

		gedung lantor/bangunan lainnya			
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	4 jenis	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum tahun n
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara tahun n

	Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	operasional atau lapangan			
			2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	8 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajaknya tahun n
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Wonosalam yang dipelihara	3 gedung	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Wonosalam yang dipelihara tahun n
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	15 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Wonosalam yang dipelihara tahun n
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	83,50	Nilai PATEN Kecamatan Wonosalam Tahun n
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan pelayanan adminduk yang diverifikasi -----x100% Jumlah pengajuan Adminduk

		diTingkat Kecamatan			
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan perizinan yang diverifikasi -----x100%
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	Jumlah pengajuan perizinan Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA -----x100% Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah rekomendasi Forkopimcam -----x100% Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan tahun n
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam tahun n
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Kabupaten	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Kabupaten	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 kegiatan	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan tahun n

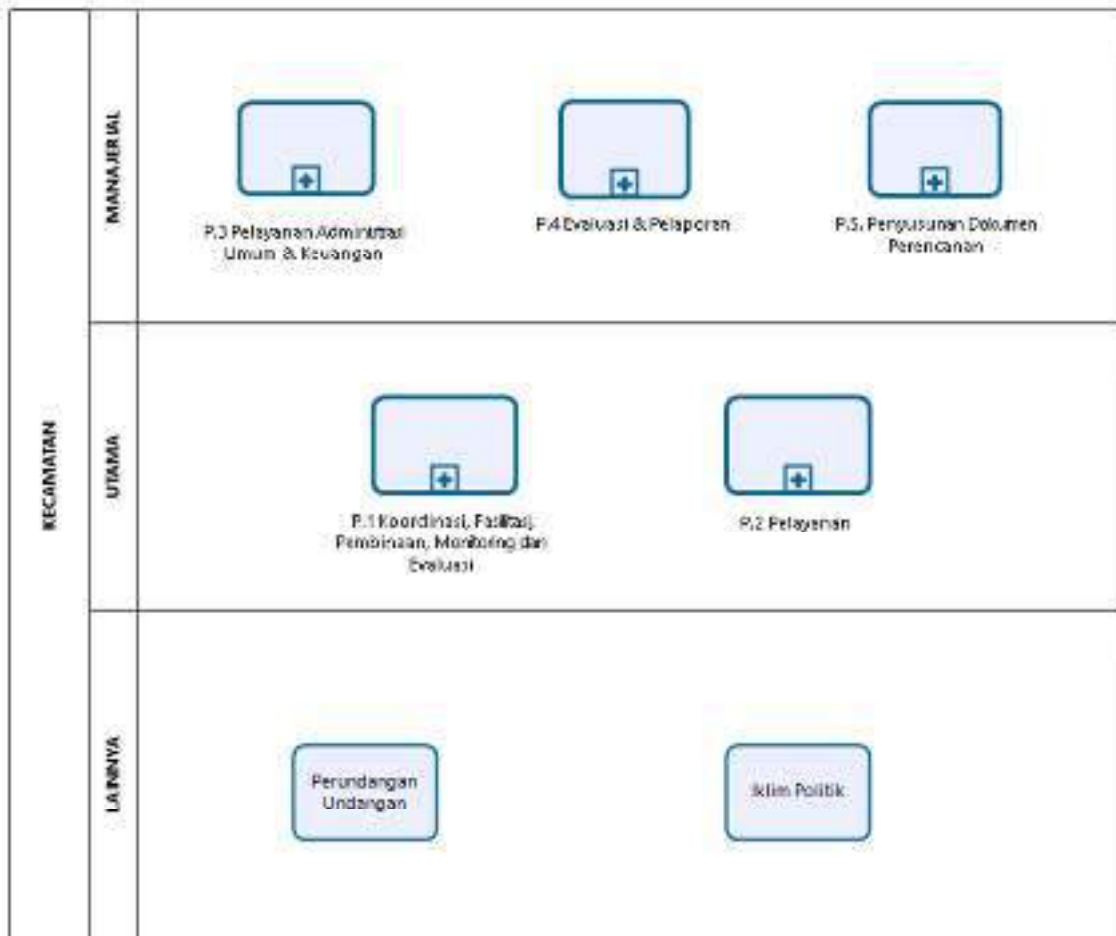
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam tahun n
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum n
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDes -----x100% Jumlah Desa

			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Monev	18 dokumen	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	18 laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	Jumlah Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi -----x100% Jumlah Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat	18 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n

			Desa/Kelurahan Yang Aktif		
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	18 dokumen	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu tahun n
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	18 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	18 dokumen	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa tahun n
			2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	9 BUMDes	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan tahun n
			3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	9 TP-PKK	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan tahun n

G. Proses Bisnis

PROSES UTAMA KECAMATAN



Powered by
bizagi
Workflow

P.0 Proses Utama Kecamatan merupakan Core utama dari proses bisnis kecamatan yaitu meliputi :

1. Manajerial

Dalam core manajerial terdapat 3 bagian penting dalam prosesnya meliputi

- *Pelayanan administrasi Umum dan Keuangan* , merupakan bagian proses bisnis yang mencakup tentang administrasi umum

seperti surat menyurat, urusan kepegawaian dan lain-lain. Serta Keuangan mencakup proses urusan gaji, pencairan keuangan seperti kebutuhan alat kantor, listrik dan lain-lain

- *Evaluasi dan Pelaporan*, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kinerja dan realisasi dari program dan kegiatan yang dijalankan dari DPA Perangkat Daerah, seperti tingkat realisasi keuangan atau tingkat kinerja dari capaian target masing-masing program/kegiatan
- *Penyusunan Dokumen Perencanaan*, yaitu proses bisnis yang mencakup kegiatan perencanaan keuangan atau kinerja yang akan dilaksanakan Perangkat daerah selama 1 tahun ke depan seperti pembuatan Renstra, Rencana Kinerja dan Rencana Keuangan Anggaran Perangkat Daerah

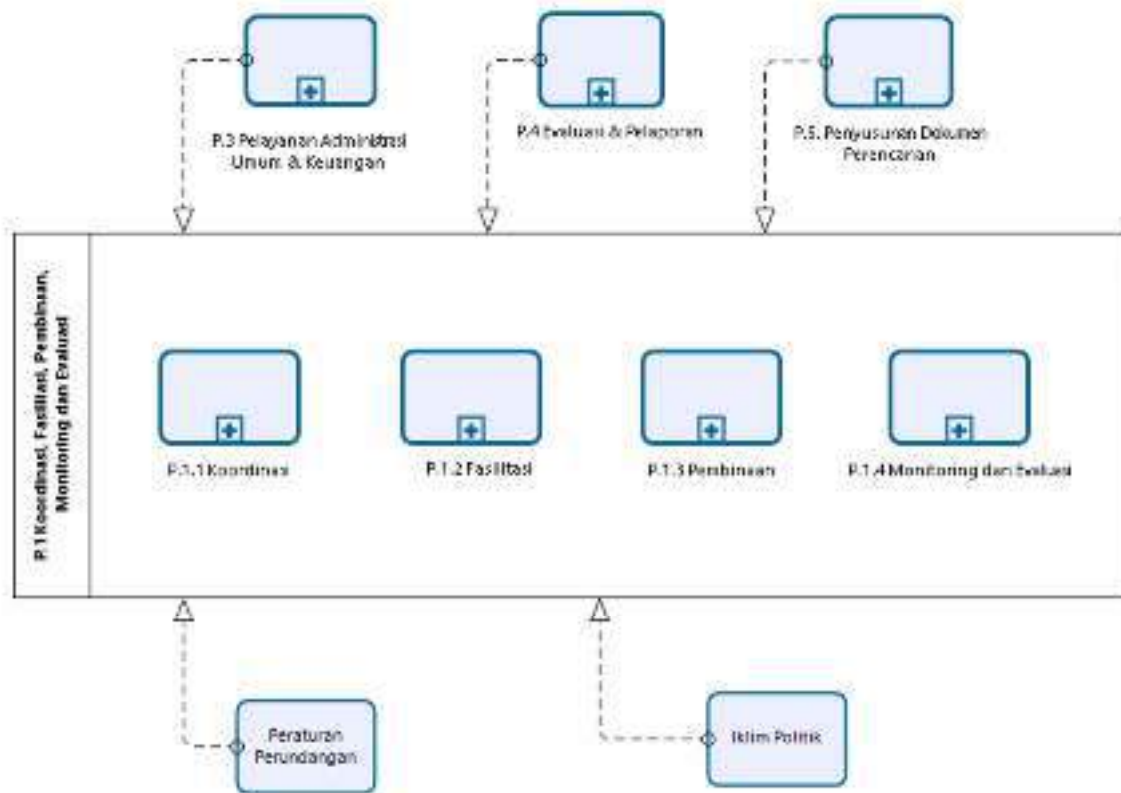
2. Core Utama

- *Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan Monitoring dan Evaluasi*, merupakan bagian utama dari proses bisnis Kecamatan yang merujuk dari tugas kecamatan seperti pembinaan kepada perangkat desa, sebagai fasilitator kegiatan serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan instansi dibawahnya / desa.
- *Pelayanan*, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kegiatan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan KTP, KK atau urusan kependudukan

3. Core Lainnya

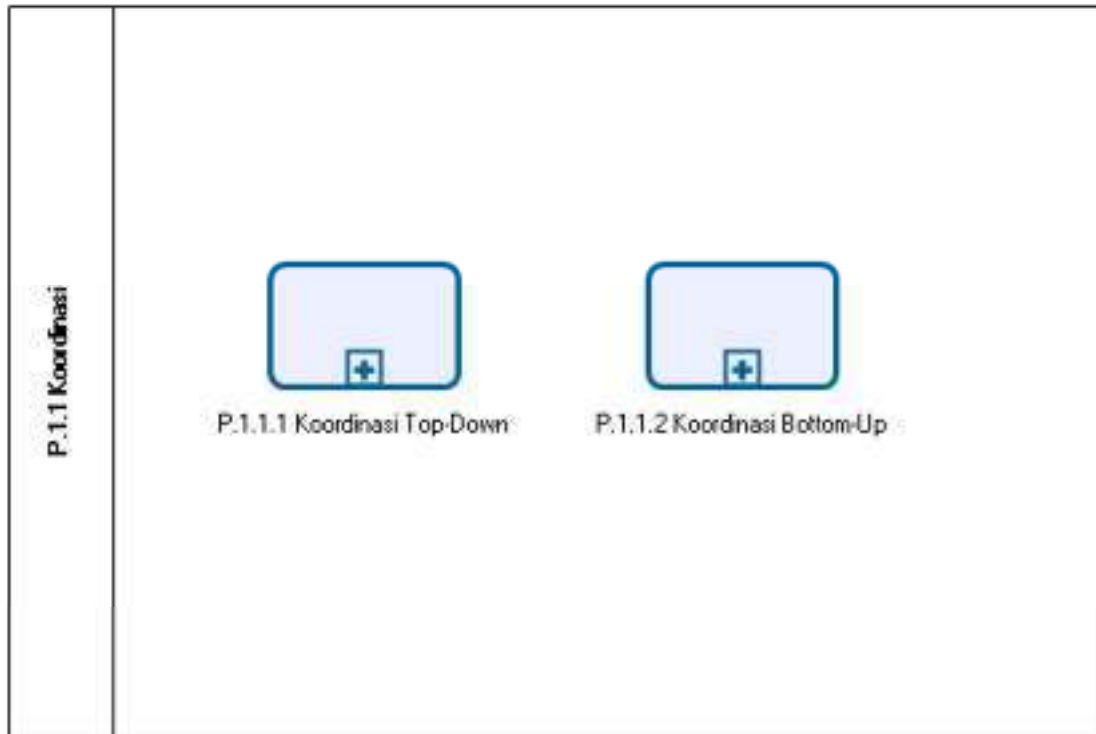
- Core lainnya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Core Utama dari proses bisnis Kecamatan yaitu Perubahan Perundang-Undangan dan iklim politik

1 P.1 Koordinasi, Fasilitas, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi



P.1 Koordinasi, fasilitas, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitas mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundang-undangan dan Iklim Politik.

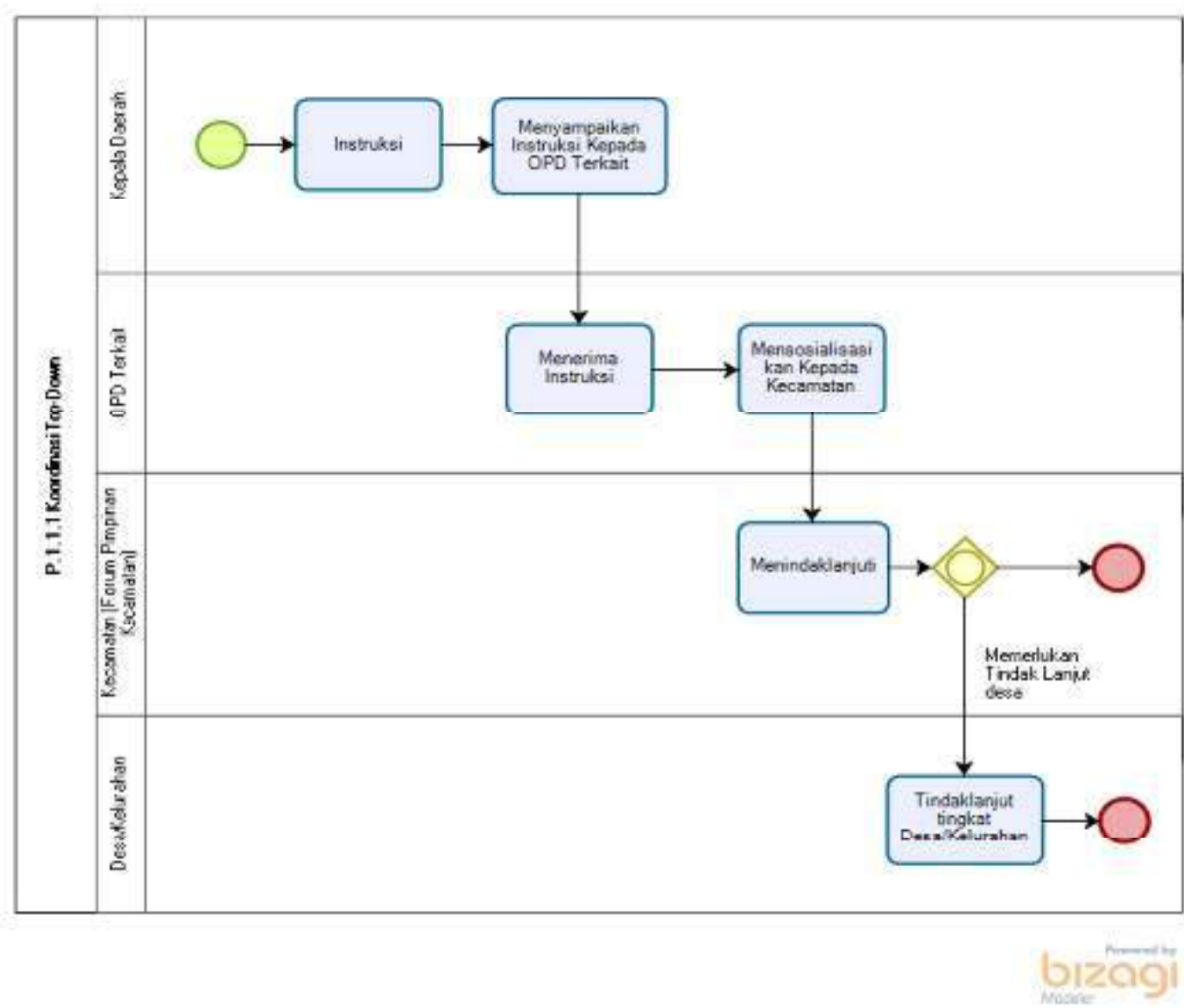
2 P.1.1 Koordinasi



P.1.1 Koordinasi , dalam core Koordinasi terdapat 2 tipe koordinasi yang dilaksanakan dalam proses bisnis kecamatan diantaranya yaitu :

1. Koordinasi Top Down yaitu merupakan tipe koordinasi dari atas ke bawah dimana peran utama kepala daerah sebagai policy maker yang kemudian akan dilaksanakan oleh instansi dibawahnya sampai ke masyarakat seperti pembuatan kebijakan atau peraturan daerah
2. Koordinasi Bottom Up yaitu merupakan tipe koordinasi dari bawah ke atas dimana dalam tipe ini masyarakat sebagai triger / yang memberikan usulan/laporan terhadap kebijakan/peraturan/kejadian yang ada di masyarakat kepada instansi di atasnya / pemerintahan desa untuk di tindak lanjuti ke instansi yang membidangi

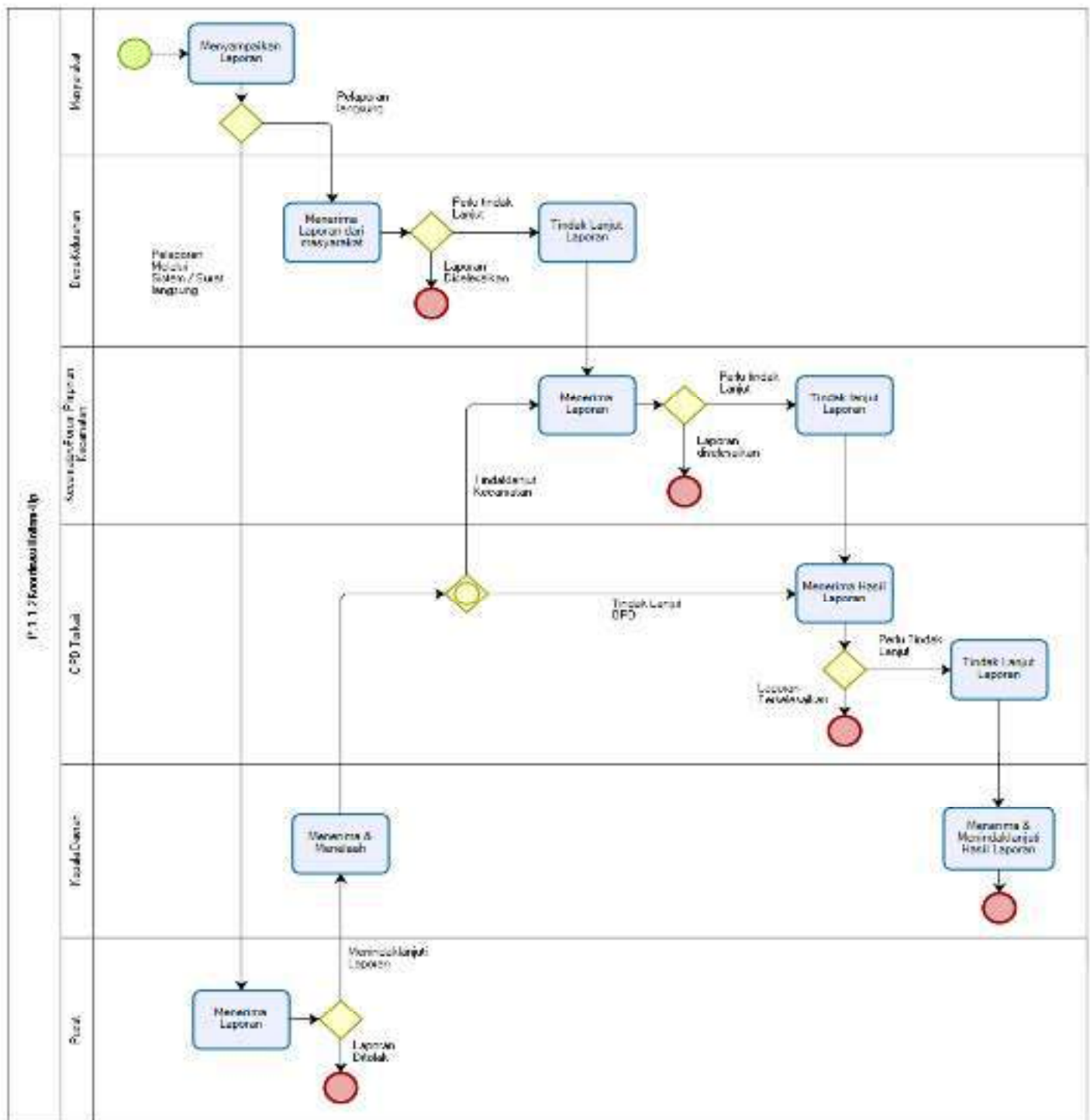
3 P.1.1.1 Koordinasi Top-Down



P.1.1.1 Koordinasi Top-Down, sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Daerah membuat kebijakan/instruksi kepada OPD terkait
2. OPD terkait menerima instruksi dari Kepala Daerah
3. OPD terkait kemudian menyosialisasikan instruksi dimaksud kepada Kecamatan
4. Kecamatan/Forkopimcam menindaklanjuti instruksi dimaksud dan dilaksanakan di tingkat Kecamatan, apabila instruksi dimaksud perlu tindak lanjut ke Pemerintah Desa, maka Kecamatan/Forkopimcam mensosialisasikan instruksi dimaksud kepada Pemerintah Desa
5. Pemerintah Desa melaksanakan instruksi Kepala Daerah.

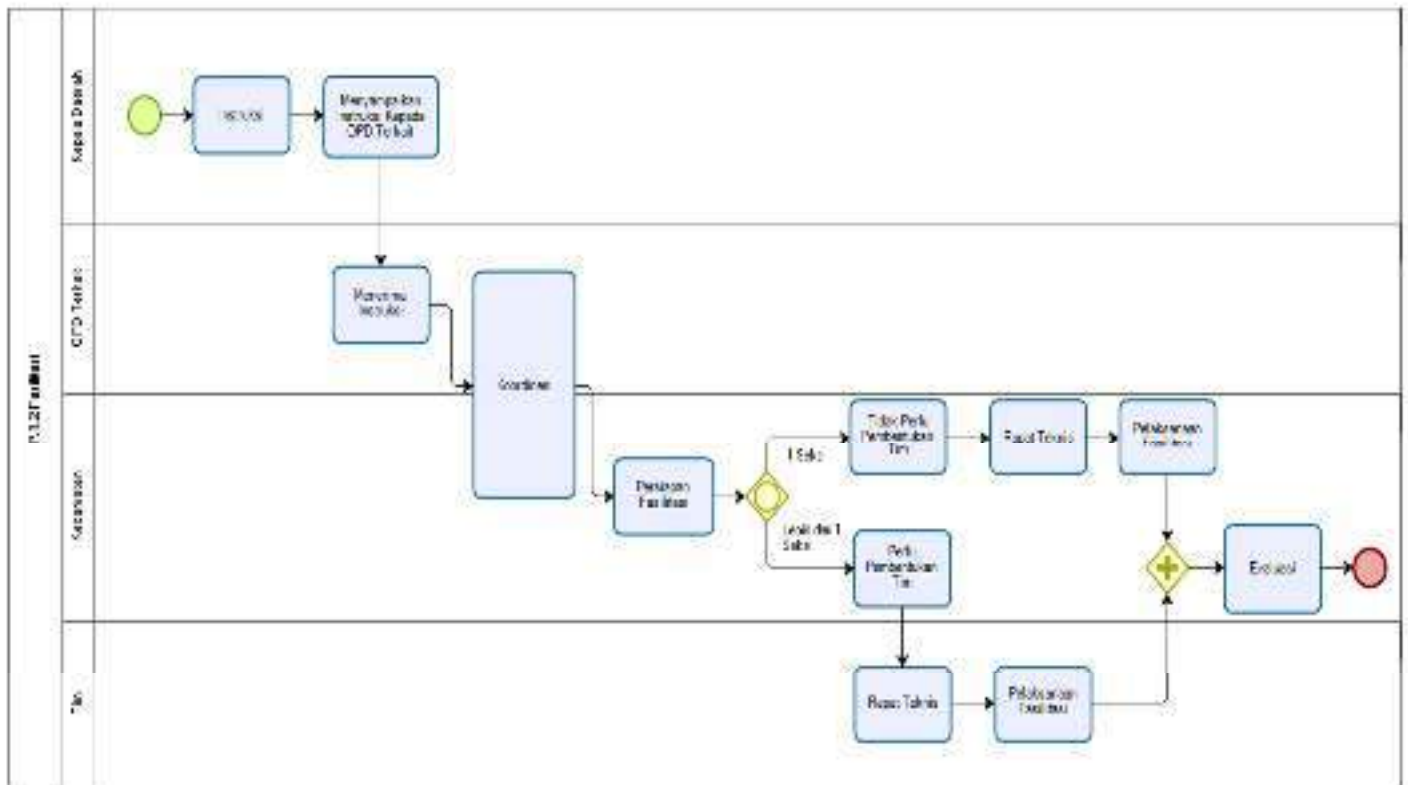
4 P.1.1.2 Koordinasi Bottom-Up



P.1.1.2 Koordinasi Bottom-Up, sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masyarakat menyampaikan laporan secara langsung kepada Pemerintah Desa
2. Pemerintah Desa menerima laporan dari masyarakat dan dilakukan penyelesaian masalah ditingkat desa, apabila tidak bisa diselesaikan di tingkat desa maka akan dilakukan tindak lanjut dan diteruskan ke Kecamatan / Forkopimcam
3. Pihak Kecamatan / Forkopimcam menyelesaikan masalah tersebut, apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan, maka akan diteruskan ke Dinas/Instansi terkait
4. Disamping itu, masyarakat dalam hal menyampaikan laporan dapat melalui sistem informasi / aplikasi atau surat secara langsung yang ditujukan kepada instansi pusat
5. Instansi pusat menerima laporan tersebut dan dilakukan verifikasi apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak. Apabila dapat ditindaklanjuti laporan tersebut didisposisi kepada Kepala Daerah
6. Kepala Daerah menerima dan mencermati laporan dari instansi pusat dan selanjutnya dilakukan telaah apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti di tingkat OPD terkait atau didisposisi ke Kecamatan/ forkopimcam
7. Dinas/instansi terkait menerima laporan dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan diteruskan ke Bupati
8. Bupati menerima laporan tersebut dan mengambil keputusan dalam rangka menyelesaikan laporan tersebut

5 P.1.2 Fasilitas

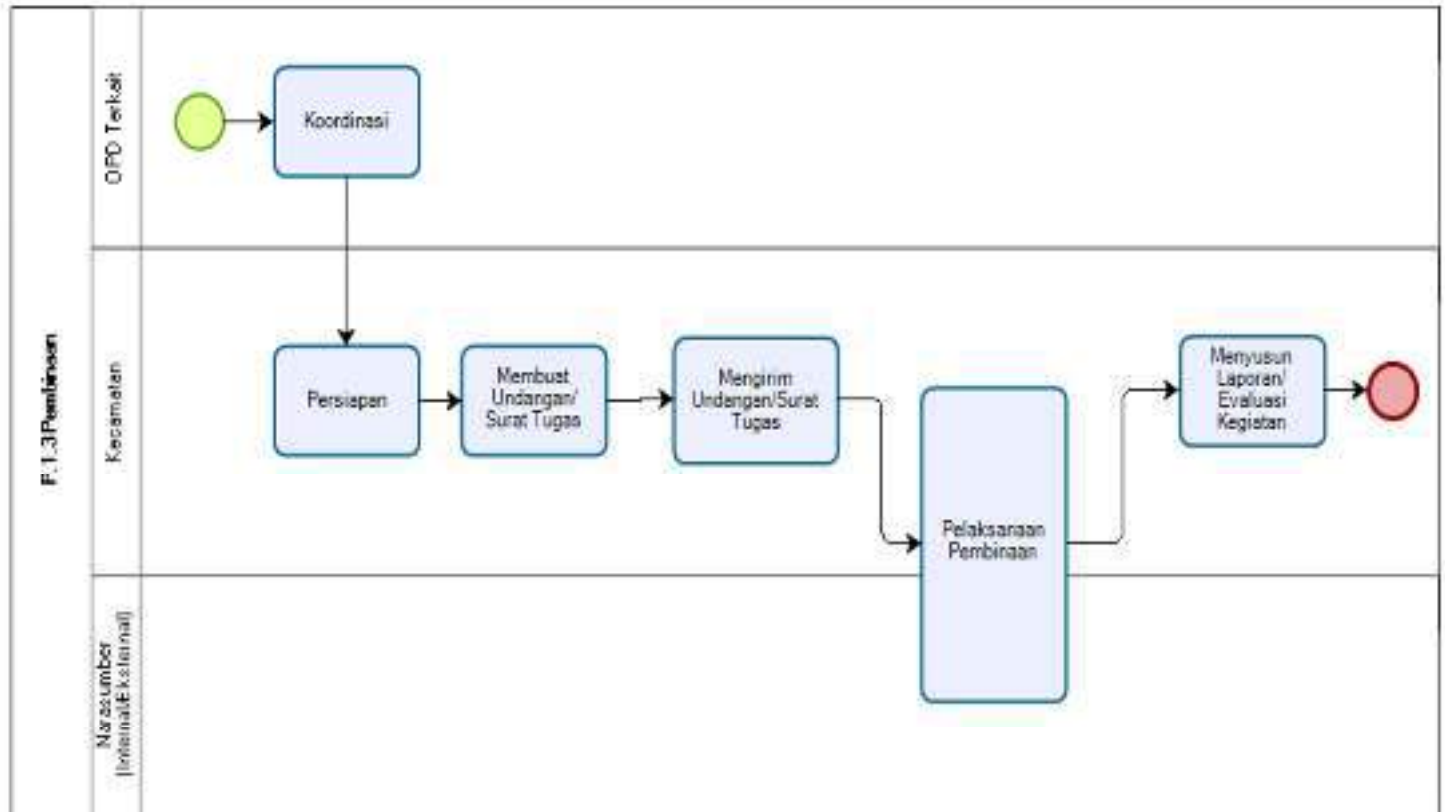


P.1.2 Fasilitas, sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kepala Daerah mengintruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait sesuai yang membidangi untuk menindaklanjuti intruksi Kepala Daerah
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menerima intruksi Kepala daerah terkait suatu hal
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan koordinasi dengan Kecamatan atau Camat untuk memfasilitasi intruksi Kepala Daerah
- Camat mendisposisikan Leading Sektor Fasilitas kepada Seksi sesuai dengan jenis fasilitas

- e. Fasilitasi bisa melibatkan hanya 1 (satu) Seksi atau lebih dari 1 (satu) Seksi di Kecamatan
- f. Ketika kegiatan fasilitasi hanya melibatkan hanya 1 (satu) Seksi maka Seksi/Kasi melaksanakan Rapat teknis dengan camat dan menyampaikan rencana fasilitasi dengan mengidentifikasi persoalan atau masalah yang akan muncul
- g. Kasi memfasilitasi kegiatan yang diintruksikan oleh Kepala Daerah
- h. Kemudian apabila kegiatan fasilitasi hanya melibatkan Lebih dari 1 (satu) Seksi maka Seksi/Kasi maka Camat membentuk Tim Fasilitasi agar fasilitasi berjalan sinkron dari masing-masing seksi kemudin Camat beserta Tim melaksanakan Rapat teknis dengan merencanakan dan mengidentifikasi persoalan atau masalah yang akan muncul
- i. Tim memfasilitasi kegiatan yang diintruksikan oleh Kepala Daerah
- j. Hasil dari memfasilitasi kegiatan kemudian dievaluasi oleh Camat.

6 P.1.3 Pembinaan

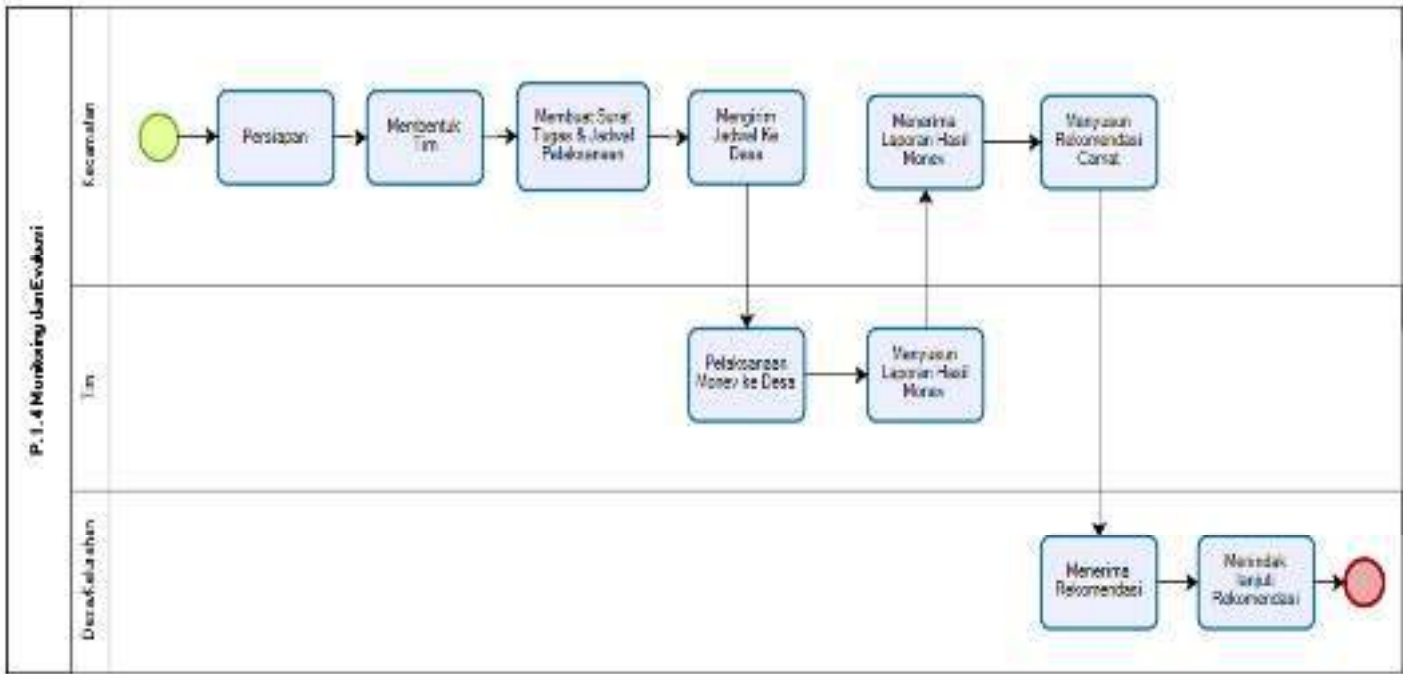


Proses P.1.3 Pembinaan sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. OPD terkait melakukan koordinasi dengan Kecamatan untuk melakukan pembinaan terkait program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Kecamatan melakukan persiapan untuk melakukan pembinaan:
 1. Rapat pembinaan: persiapan terkait pelaksanaan baik itu undangan, tanggal, tempat, konsumsi peserta rapat dll;
 2. Pembinaan ke desa: persiapan terkait pembuatan surat tugas dan pelaksanaan kegiatan Musdes RKPDes, Musdes APBDes, Musdes Realisasi APBDes dan Monev APBDes.

- Kecamatan melakukan pengiriman undangan untuk rapat pembinaan;
- Pelaksanaan pembinaan:
 1. Rapat pembinaan menghadirkan narasumber dari instansi terkait;
 2. Pembinaan kunjungan ke desa.
- Kecamatan menyusun laporan:
 1. Rapat pembinaan: menyusun notulen rapat pembinaan;
 2. Pembinaan ke desa: menyusun laporan evaluasi kegiatan.

7 P.1.4 Monitoring dan Evaluasi



P.1.4 Monitoring dan Evaluasi, sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Camat, Kasi beserta Staf mempersiapkan rencana monitoring kepada desa berdasarkan agenda rutin, baik itu Mingguan, Bulanan, Tribulan atau Semester dengan memperhatikan beban kerja dan jumlah Desa/Kelurahan yang akan diMonev serta mengidentifikasi kegiatan hambatan atau masalah yang ada di Desa/Kelurahan
- b. Camat beserta Kasi mencermati hasil persiapan dengan membentuk Tim Monitoring dan membagi Jumlah Tim sesuai dengan bidang atau keahlian masing-masing.
- c. Camat membuat Surat tugas dan Rancangan jadwal pelaksanaan Monev.
- d. Sekretariat Membuat Surat Jadwal Monev yang ditujukan kepada Desa/Kelurahan
- e. Tim monitoring melaksanakan monev ke Desa
- f. Tim Menyusun Laporan Hasil Monitoring yang akan dilaporkan kepada Camat
- g. Camat Menerima Hasil Monitoring dan mengevaluasi hasil laporan
- h. Kasi menyusun Rekomendasi hasil Evaluasi Camat yang akan ditindaklanjuti oleh Desa/Keluarahan
- i. Sekretariat Mengirim Surat Hasil Rekomendasi Camat Kepada Desa/Keluarahan
- j. Desa/Kelurahan Menerima surat Hasil Rekomendasi hasil Monitoring

- k. Desa/Kelurahan Menindaklanjuti Rekomendasi Camat untuk diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Wonosalam sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
AA	> 90 s/d 100	: Sangat Memuaskan
A	> 80 s/d 90	: Memuaskan
BB	> 70 s/d 80	: Sangat Baik
B	> 60 s/d 70	: Baik
CC	> 50 s/d 60	: Cukup Baik
C	> 40 s/d 50	: Agak Kurang
D	0 s/d 40	: Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang

diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Wonosalam memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 serta Renja Perubahan 2022.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Wonosalam diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2022, Kecamatan Wonosalam memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Wonosalam tahun 2021 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wonosalam Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Wonosalam
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Wonosalam

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Wonosalam	Nilai Evaluasi AKIP	72.5	72.93	100.59
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Wonosalam	IKM Kecamatan Wonosalam	85.66	85,05	99.29
	IPP Kecamatan Wonosalam	3,4	2.64	77.65
	Persentase laporan pelanggaran Perda danTrantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100	100	100
	Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	100	100	100
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100	100	100
RATA – RATA CAPAIAN IKU				96.25

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Wonosalam Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 72.50 telah tercapai 72,93 dengan tingkat capaian 100.53%;
2. IKM Kecamatan Wonosalam ditargetkan 85.66 tercapai 85.05 dengan tingkat capaian 99.29%. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2022 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Wonosalam ditargetkan 3,4 tercapai 2.64 dengan tingkat capaian 77.65%.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang

ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Wonosalam telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 berserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 18 dokumen
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Wonosalam telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 18 dokumen.

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Wonosalam Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	-
2.	Sesuai target	96.25%
3.	Tidak mencapai target	-

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wonosalam Tahun 2022 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTAS E CAPAIAN
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	100%
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%

			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Wonosalam yang difasilitasi	14 bulan	14 bulan	100%
	2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Kali	12 kali	100%
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	4 jenis	4 jenis	100%
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 jenis	3 jenis	100%
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	-	-	100%

			2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan	10000 lembar	10000lembar	100%
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	1 jenis	100%
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 dok	3 dok	100%
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	1 unit	1 unit	100%
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	12 bulan	100%

	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	4 jenis	4 jenis	100%
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%
			2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	8 unit	8 unit	100%
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Wonosalam yang dipelihara	3 gedung	3 gedung	100%
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	15 unit	15 unit	100%

		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	83,50	83,50	100%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100%	100%
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100%	100%
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

	Penugasan Kepala Daerah	Daerah				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	4 laporan	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Kabupaten	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Kabupaten	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	12 laporan	100%
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

	Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Trantibum yang dilaksanakan			
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Monev	18 dokumen	18 dokumen	100%
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	18 laporan	18 laporan	100%

	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	18 lembaga	18 lembaga	100%
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	18 dokumen	18 dokumen	100%
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	18 lembaga	18 lembaga	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	18 dokumen	18 dokumen	100%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2020	2021	2022
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	72,5	64,08	72,23	72,93
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	IKM Kecamatan Wonosalam	85,66	89,49	85,66	85,05
	IPP Kecamatan Wonosalam	3,4	2,99	3,33	2,64
	Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100	N/A	100%	100
	Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	100	N/A	100%	100
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100	N/A	100%	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2020-2022 sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2020-2022 meningkat 8,15 sedangkan 2021-2022 meningkat 0,70;
2. IKM Kecamatan Wonosalam dari tahun 2021-2022 mengalami penurunan 0,61 dikarenakan ada beberapa unsur pendukung IKM yang perlu dilakukan dilakukan perbaikan seperti sarpras dan kompetensi petugas, untuk 2023 akan dilakukan strategi perbaikan untuk mendorong peningkatan capaian nilai IKM.
3. IPP Kecamatan Wonosalam dari tahun 2020-2021 mengalami Penurunan 0,69 untuk 2023 akan dilakukan strategi perbaikan untuk mendorong peningkatan capaian nilai IPP.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait dari tahun 2021-2022 tercapai 100%;
5. Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu belum dapat dibandingkan karena pada tahun tahun 2021-2022 tercapai 100%;
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa

tepat waktu tahun 2021-2022 tercapai 100%.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	73	72,93	99,89%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	IKM Kecamatan Wonosalam	86	85,05	98.90%
	IPP Kecamatan Wonosalam	3,4	2,64	77.65%
	Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100	100%
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN				99,97

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP telah mencapai tingkat kemajuan 99,89%, target periode akhir renstra 73 pada tahun 2022 telah tercapai 72,93;
2. IKM Kecamatan Wonosalam telah mencapai tingkat kemajuan 98.90% target periode akhir renstra 86 pada tahun 2022 telah tercapai 85,05
3. IPP Kecamatan Wonosalam telah mencapai tingkat kemajuan 77.65% target periode akhir renstra 3,4 pada tahun 2022 telah tercapai 2.64
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir

periode renstra target tetap 100%

- 5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
- 6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Kabupaten.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi SAKIP, IPP dan IKM Kec. Wonosalam dengan Skala Kabupaten dan Skala Nasional

Uraian	Realisasi Kec Wonosalam	Realisasi Kabupaten	Realisasi Nasional	Keterangan
Nilai AKIP	72,93	72.14	67,93	
Nilai IPP	2,64	3.632	3,88	
Nilai IKM	85,05	86.71	-	Tidak ditemukan hasil nasional

Sumber : Laporan Kinerja Kemenpan RB tahun2022

Berdasarkan Tabel diatas didapati Capaian Kinerja Kecamatan Wonosalam tahun 2022 dibandingkan dengan Capaian kinerja tahun 2022 Standart Kabupaten nliainya sudah Melebihi dengan rincian pada tahun 2021 Nilai SAKIP Kecamatan 72,93 (BB) sedangkan nilai SAKIP Kabupaten 72,14 ada selisih lebih sekitar 0.79 Poin. Untuk capaian nilai IPP Kecamatan Wonosalam Tahun 2022 2.64 sedangkan Nilai IPP Kabupaten sebesar 3,632 dengan selisih kurang sebesar 0,992 poin. Sedangkan untuk Pencapaian Nilai IKM/SKM Kecamatan Wonosalam tahun 2022 sebesar 85,05 sedangkan nilai SKM Kabupaten sebesar 86.71 atau selisih 1.66 poin.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2022 target sasaran strategis Kecamatan Wonosalam tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 96.25% dengan kata lain kinerja kecamatan kurang dari target yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada tahun 2022 nilai IPP dan IKM Kecamatan Wonosalam tidak mencapai target yang ditetapkan karena terkait unsur penilaian IKM berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik unsur penilaian sarana dan prasarana dan kompetensi petugas perlu dilakukan perbaikan.

5.1 Nilai SAKIP Kecamatan Wonosalam pada tahun 2022

Berdasarkan LHE dari Tim Evaluasi Kabupaten nomor X. 700/ 330 /415.15/2022 tanggal 30 September 2022 sebesar 72,93 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30 %	26,22
b	Pengukuran Kinerja	30 %	22,17
c	Pelaporan Kinerja	15 %	6,41
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	18,13
Hasil Evalausi Akuntabilitas Kinerja			72,93

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Wonosalam Kabupaten Jombang, agar :

- a. Dalam menetapkan target kinerja terutama pada Indikator Kinerja Utama sebaiknya dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis dengan mempertimbangkan dengan capaian tahun sebelumnya.
- b. Target jangka menengah dalam Renstra yang telah dimonitor pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah agar ditindaklanjuti dengan menambahkan tindak lanjut hasil monitoring serta hambatan yangdiuraikan hanya sebatas anggaran dan dalam pelaksanaan monitoring Renstra belum terdapat mekanisme atau Standar Operasional Prosedur yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secaraperiodik.
- c. Segera menyusun dan mengkoordinasikan dengan Bappeda Kabupaten Jombang mekanisme/ Standar Operasional Prosedur untuk monitoring Renstra secara periodik.
- d. Melakukan update mekanisme/ Standar Operasional Prosedur yang jelas tentang mekanisme pengukuran kinerja secara periodik dan merevisi alur Standar Operasional Prosedur tidak hanya pada pengukuran Indikator Kinerja Utama saja melainkan capaian kinerja secara keseluruhan.

- e. Agar dalam pemberian reward dan punishment atas penilaian kinerja pegawai dibuatkan standar yang jelas atas pengukuran capaian kinerja.
- f. Melakukan inventarisasi data kinerja (dokumen sumber) yang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan di setiap indicator kinerja.
- g. Memperbaiki Mekanisme/SOP terhadap pengumpulan data kinerja agar data mudah diakses bagi pihak yang berkepentingan.
- h. Memperbaiki Laporan Kinerja (LKjIP) untuk dilampirkan cascading dan Proses bisnis secara keseluruhan.
- i. Jika dimungkinkan Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
- j. Menambahkan dalam Laporan Kinerja untuk menyajikan efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai.
- k. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.
- l. Mengusulkan bimtek evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi.
- m. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada seluruh unit kerja di lingkup Kecamatan Wonosalam.
- n. Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam
- o. pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- p. Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja.

5.2 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural

dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Dukungan dan komitmen Camat Wonosalam, Kepala UPTD/B Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Wonosalam untuk mencapai tujuan organisasi.

5.3 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai.
- d. Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan, sedangkan pada pelayanan bidang non perijinan point Mencetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk juga kurang relevan disebabkan kewenangan mencetak/menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah pada Dispendukcapil Kab. Jombang, kecamatan hanya berhak memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- e. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi.
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendukung

pelayanan yang perlu dipenuhi seperti arena bermain anak, tempat parkir dll

5.4 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perUndangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
- c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait tanggung jawab penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi agar semua stakeholder memahami bahwasanya SAKIP adalah tanggung bersama.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Wonosalam sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Resntra 2014-2018 Kecamatan Wonosalam yakni: Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Wonosalam melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Wonosalam langsung memberi tanggungjawab

kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Wonosalam melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	100.59	98,90	-2.67
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	IKM Kecamatan Wonosalam	95,72	100	-4,28
		IPP Kecamatan Wonosalam	77,65	100	-22.35
		Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100	100	100
		Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	100	100	0
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100	100	0
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA			96.25	98.92	-2.67

TABEL 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2022			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	72.5	72.93	100.59	19	4	21,05 %	81,09
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Bareng	85.66	85,05	99.29	10	6	60 %	39,29
	IPP Kecamatan Bareng	3,4	2.64	77.65				17,65
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100	100	100	7	3	42,85 %	57,15
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100	100	100	6	2	33,33 %	66,67
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100	100	100	4	2	50 %	50
RATA - RATA CAPAIAN IKU				96,25%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		41,45 %	51,93 %

7. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Kecamatan Wonosalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100	2.133.245.080	98,90	Sangat menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100	3.022.000		Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	100	2.122.000		Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	100	900.000		Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100	1.765.779.790		Sangat menunjang
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Wonosalam yang difasilitasi	14 bulan	100	1.702.009.790		Sangat menunjang
2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	100	63.270.000		Sangat menunjang
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Kali	100	500.000		Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	4.200.000		Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	4 jenis	100	4.029.000		Sangat menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 jenis	100	12.050.000		Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	-		3.483.000		Sangat menunjang
	2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan	10000 lembar	100			Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	100	2.352.000		Sangat menunjang
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 dok	100	7.420.000		Sangat menunjang
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100	7.874.000		Sangat menunjang
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	1 unit	100	7.874.000		Sangat menunjang
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	75.483.290		Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	100	9.633.993		Sangat menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	4 jenis	100	65.849.297		Sangat menunjang
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100	247.552.000		Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	100	43.685.300		Sangat menunjang
	2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	8 unit	100			Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Wonosalam yang dipelihara	3 gedung	100	198.996.700		Sangat menunjang
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	15 unit	100	4.870.000		Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	83,50	100	4.250.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100	4.250.000		Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100	4.250.000		Sangat menunjang
	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100			Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100	1.200.000	100	Sangat menunjang
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100			Sangat menunjang
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 Kegiatan	100	1.200.000		Sangat menunjang
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4 laporan	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Kabupaten	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 kegiatan	100	800.000		Sangat menunjang
Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	4 Laporan	100	400.000		Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100	4.800.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	100	4.800.000		Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	100	4.800.000		Sangat menunjang
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100	9.796.000	100	Sangat menunjang
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100			Sangat menunjang
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Monev	18 dokumen	100	9.796.000		Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	18 laporan	100	9.796.000		Sangat menunjang
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100	25.044.000	100	Sangat menunjang
	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	18 lembaga	100			Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	18 dokumen	100	25.044.000		Sangat menunjang
	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	18 lembaga	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	18 dokumen	100	25.044.000		Sangat menunjang

B. Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Wonosalam Tahun 2022, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 11 kegiatan, dan 22 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2022 ini Kecamatan Wonosalam mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.202.143.894,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.178.335.080,00 atau serapan dana APBD mencapai 98,92 % sehingga dapat diketahui pada tahun 2022 kondisi anggaran silpa Rp. 23.808.814,00 Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.10
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Wonosalam	Nilai Evaluasi AKIP	2.133.245.080	97.95
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Wonosalam	IKM Kecamatan Wonosalam	4.250.000	0.19
		IPP Kecamatan Wonosalam	1.200.000	0.06
		Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	4.800.000	0.217
		Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	25.775.000	1.137
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	9.796.000	0.44
TOTAL			2.202.143.894	100

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggararan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Wonosalam	Nilai Evaluasi AKIP	72,5	72,93	100,59	2.133.245.080	2.133.245.080	98,90
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Wonosalam	IKM Kecamatan Wonosalam	85,66	85,05	99,29	4.250.000	4.250.000	100
		IPP Kecamatan Wonosalam	3,4	2,64	77,65	1.200.000	1.200.000	100
		Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100	4.800.000	4.800.000	100
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100	25.775.000	25.775.000	100
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100	9.796.000		100
RATA -RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN					96.25	2.202.143.894	2.178.335.080	98,92

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 98.92% telah menghasilkan kinerja sebesar 96.25% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar **-2.67%**

Secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Wonosalam tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.12
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN WONOSALAM TAHUN 2022

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100,00	2.157.053.894	2.133.245.080	98,90
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	83,5	80,4	96,29	4.250.000	4.250.000	100,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100	100	100,00	1.200.000	1.200.000	100,00
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100	100	100,00			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100	100	100,00	4.800.000	4.800.000	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100	100	100,00	9.796.000	9.796.000	100,00
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100	100	100,00			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100	100	100,00	25.044.000	25.044.000	100,00
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	18	18	100,00			
RATA –RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN				99,59	2.202.143.894	2.178.335.080	98,92

BAB IV PENUTUP

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Wonosalam berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 Kecamatan Wonosalam .

Laporan kinerja Kecamatan Wonosalam Tahun 2022 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Wonosalam.

Selama Tahun 2022 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Wonosalam” dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Wonosalam” dengan capaian kinerja sebesar 96.25%.

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan perodesasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2023 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2018-2023.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Wonosalam untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

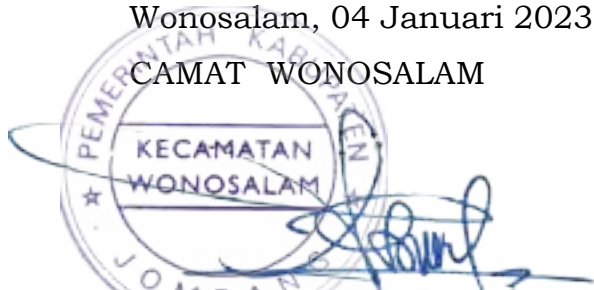
1. Mendorong upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh seksi dan sub bagian dalam pencapaian kinerja.
2. Mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam seluruh lini untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
3. Mendorong pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pelayanan dan pemerintahan

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Perubahan Renstra Kecamatan Wonosalam Tahun 2018-2023 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Wonosalam Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai harapan. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian Visi Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wonosalam diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Wonosalam kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Wonosalam, 04 Januari 2023

CAMAT WONOSALAM



HARIS AMINUDDIN, S.STP

Pembina

NIP. 19790401 199810 1 002